



Kontestasi Populisme Versus Anti-Populisme dalam Lanskap Politik Digital Indonesia di Era *Post-Truth*

Nur Azizah¹, Launa², Bambang Mudjiyanto³, Hayu Lusianawati⁴

¹Univesitas Bung Karno, Jl. Kimia No. 20, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, Indonesia

³Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jl. Gatot Subroto, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, 12710, Indonesia

^{2,4}Universitas Sahid, Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 84, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 12870, Indonesia

E-mail : launa@usahid.ac.id

Article Info

Article history:

Received July 11, 2026

Revised July 13, 2026

Accepted July 15, 2026

Keywords:

Populism, Anti-Populism, Post-Truth Era, Digital Politics, Discursive Accountability

ABSTRAK

This study analyzes the contestation of populism and anti-populism in the post-truth political landscape of the Prabowo Subianto administration. Using a synthesis of Aristotelian-Kantian ethics and CDA, the study reveals the transformation of truth production, narrative legitimization strategies, the construction of the identity of the 'people' based on antagonism, and the crisis of rationality resulting from algorithmic polarization. The findings show that populist discourse dominates the digital space through affective mobilization that reduces factual verification, while anti-populist discourse is marginalized. This degrades public rationality into mere identity contestation. This study recommends strengthening discursive accountability and digital literacy to mitigate perception manipulation, in order to save public autonomy and the integrity of Indonesian democracy from the hegemony of managed narratives that erode the quality of governance.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 11, 2026

Revised July 13, 2026

Accepted July 15, 2026

Kata Kunci:

Populisme, Anti-Populisme, Era Pascakebenaran, Politik Digital, Akuntabilitas Diskursif

ABSTRACT

Studi ini menganalisis kontestasi populisme dan anti-populisme dalam lanskap politik pascakebenaran era Pemerintahan Prabowo Subianto. Melalui pendekatan sintesis etika Aristotelian-Kantian dan Analisis Wacana Kritis, kajian mengungkap transformasi produksi kebenaran, strategi legitimasi naratif, konstruksi identitas 'rakyat' berbasis antagonisme, serta krisis rasionalitas akibat polarisasi algoritmik. Temuan menunjukkan: wacana populis mendominasi ruang digital melalui mobilisasi afektif yang mereduksi verifikasi faktual, sementara wacana anti-populisme terpinggirkan. Hal ini mendegradasi rasionalitas publik sekedar kontestasi identitas. Studi ini merekomendasikan penguatan akuntabilitas diskursif dan literasi digital untuk mitigasi manipulasi persepsi, guna menyelamatkan otonomi publik dan integritas demokrasi Indonesia dari hegemoni narasi terkelola yang menggerus kualitas pemerintahan.



This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Nama penulis: Launa
Universitas Sahid Jakarta
Email: launa@usahid.ac.id

PENDAHULUAN

Transformasi komunikasi global yang terus bergerak intens di era digital, praktis telah memicu lahirnya wajah baru dalam kekuasaan, diantaranya adalah menguatnya fenomena politik pascakebenaran (*post-truth*). Di era pascakebenaran, dimana platform media sosial menjadi pemegang kendali, fakta objektif tidak lagi menjadi basis utama dalam verifikasi kebenaran informasi. Ia telah bergeser ke informasi berbasis narasi, simbol, identitas, dan emosi. Perkembangan teknologi media sosial memungkinkan produksi serta distribusi informasi berlangsung secara cepat, masif, dan sulit diverifikasi (Harsin, 2015). Akibatnya, ruang publik mengalami bias epistemik, di mana batas antara fakta, opini, propaganda, dan disinformasi menjadi kabur. Di sini, politik tidak lagi menjadi arena kompetisi ide rasional-programatik, tetapi sekedar alat pertarungan narasi, simbol, dan emosi (McIntyre, 2018).

Fenomena tersebut, kasat mata, ikut membentuk dinamika politik Indonesia mutakhir, terutama dengan menguatnya kontestasi antara populisme dan anti-populisme. Populisme berkembang sebagai strategi politik yang membangun dikotomi antara 'rakyat' versus 'elite', sekaligus mengklaim diri sebagai representasi otentik kehendak publik (Mudde & Kaltwasser, 2017). Sebaliknya, anti-populisme adalah sikap, ideologi, atau gerakan yang menentang narasi dan kebijakan politik populis. Secara operasional, anti-populisme adalah segala bentuk penolakan terhadap politik anti-kemapanan, kerusakan pada institusi rasional, serta pembelaan terhadap nilai-nilai pluralisme (Jagers & Walgrave, 2007).

Di Indonesia, populisme tampil dalam ragam wajah, mulai gerakan populisme religius, gerakan nasionalis, *anarcho-sydicalism*, gerakan lingkungan (*eco-labeling*), hingga gerakan populisme digital (produk dari ekosistem digital). Sementara itu, anti-populisme hadir sebagai respons terhadap menguatnya politik emosional dan polarisasi identitas, dengan menekankan rasionalitas, moderasi, dan stabilitas demokrasi. Gerakan anti-populisme adalah respons politik, intelektual, dan sosial terhadap narasi populis yang cenderung memecah belah. Gerakan anti-populis berupaya melindungi lembaga demokrasi, supremasi hukum, dan keberagaman dari politisi yang mengeksploitasi sentimen sempit, korup, banal, dan anti anti-perubahan. Kedua gerakan ini tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan berkompetisi dalam membentuk persepsi politik masyarakat (Moffitt, 2018).

Konteks politik Indonesia pasca pemilu 2014 dan 2019 menunjukkan bagaimana populisme berkembang melalui mobilisasi identitas, eksploitasi emosi, dan pengerahan sentimen sosial di ruang digital. Polarisasi politik berbasis agama, nasionalisme, dan identitas kelompok mengalami intensifikasi melalui platform media sosial yang mempercepat penyebaran disinformasi dan propaganda politik (Lim, 2017). Fenomena ini memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak sekedar menjadi medium komunikasi, tetapi juga infrastruktur produksi sekaligus reproduksi realitas politik. Dalam ekosistem *post-trust*, legitimasi politik



kerap dibangun bukan lewat argumentasi rasional, melainkan lewat kemampuan menciptakan resonansi emosional dan loyalitas kolektif berbasis identitas (Fuchs, 2024).

Namun, di Indonesia, literatur studi politik masih memaknai populisme maupun anti-populisme secara normatif: sekadar paradigma kepemimpinan atau instrumen teknis elektoral. Pendekatan kritis-reflektif dianggap belum memadai untuk mengungkap mekanisme produksi makna dan konstruksi relasi kuasa yang melandasi diskursus populisme serta anti-populisme dalam arsitektur ekosistem digital. Secara paralel, kajian mengenai fenomena pascakebenaran (*post-truth*) masih terbatas pada dimensi teknis disinformasi dan misinformasi, tanpa melihat hubungan analitis yang substantif dengan dinamika kontestasi ideologis antara populisme versus anti-populisme. Akibatnya, terdapat kesenjangan epistemik dan metodologis dalam memahami proses komunikasi, terpaan informasi, dan legitimasi narasi politik di ruang digital—khususnya mengenai bagaimana infrastruktur algoritmik dan praktik wacana elite saling merekonfigurasi opini dan persepsi kolektif publik (Stavrakasis, 2014).

Di sisi lain, dinamika politik digital di Indonesia menunjukkan, sejak dua dekade lalu media sosial telah menjadi arena utama perebutan makna (legitimasi) politik. Algoritma platform digital memicu munculnya *echo chamber*, polarisasi emosi, segregasi sosial, dan fragmentasi politik yang makin memperkuat politik identitas (Sunstein, 2018). Dalam kondisi demikian, gerakan populisme mendapat ruang ekspansi yang besar karena bisa memanfaatkan logika viralitas media digital. Sebaliknya, gerakan anti-populisme juga tumbuh senyap lewat wacana rasionalitas demokrasi dan kritik terhadap politik identitas yang dianggap mengancam kohesi sosial. Dalam konteks ini, kontestasi politik tidak lagi berlangsung pada level formal-institusional, melainkan telah bertransformasi ke ranah produksi wacana, penguasaan infrastruktur digital, dan pengelolaan persepsi publik yang terkoneksi dan terdistribusi.

Merujuk fenomena di atas, kajian ini berupaya menganalisis dinamika wacana populis versus anti-populis dalam lanskap politik *post-truth* di Indonesia. Secara konseptual, kedua wacana tidak dikonstruksi sebagai entitas dikotomis yang statis, melainkan sebagai konsep diskursif yang secara dinamis memproduksi makna, mengaktifkan simbol identitas, dan merekonfigurasi afiliasi kolektif di ruang digital. Melalui perspektif ini, kajian berupaya menyingkap bagaimana interseksi antara infrastruktur teknologi, relasi kuasa, dan strategi naratif menghasilkan konfigurasi politik digital yang—di era Prabowo—terfragmentasi secara politik, sosial, dan kultural, namun terintegrasi secara apik dalam formasi algoritmik.

Secara teoritis, kajian ini menggunakan pendekatan *post-truth* yang dipopulerkan oleh Steve Stojan Tesich pada tahun 1992 (sciencedirect.com, 2017) dan teori diskursus kekuasaan versi Michel Foucault (1980). Tujuannya, untuk memahami bagaimana pengetahuan dan narasi diproduksi sebagai instrumen legitimasi politik. Selain itu, konsep populisme versi Ernesto Laclau (2005) juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana ‘rakyat’ dikonstruksi sebagai identitas antagonistik dalam artikulasi wacana politik. Perspektif ini memungkinkan analisis beroperasi secara lebih kritis terkait hubungan antara populisme, media digital, dan produksi kebenaran dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

State of the art kajian menunjukkan bahwa studi tentang populisme di Indonesia telah berkembang pesat, terutama terkait isu populisme Islam, media sosial, dan demokrasi digital (Hadiz, 2016; Mietzner, 2020). Sementara itu, kajian mengenai *post-truth* banyak menyoroti penyebaran hoaks dan disinformasi politik dalam media digital (Lim, 2017). Namun, masih sedikit kajian yang secara khusus memetakan hubungan dialektis antara populisme dan anti-populisme dalam konteks politik di era *post-truth*. Sebagian besar studi masih memisahkan dua



fenomena tersebut, sehingga belum bisa menjelaskan secara komprehensif bagaimana keduanya bisa saling memproduksi dan mereproduksi polarisasi politik di ruang digital.

Kebaruan (*novelty*) kajian terletak pada upaya akademis kajian ini mengintegrasikan perspektif populisme dan anti-populisme serta perspektif *post-truth* dalam satu kerangka analisis kritis. Kajian ini tidak hanya melihat populisme sebagai strategi politik, tetapi juga sebagai praktik (produksi) wacana yang beroperasi melalui logika algoritmik, politik identitas, dan resonansi emosional di platform media sosial. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memahami transformasi demokrasi dan komunikasi politik di Indonesia di era politik pascakebenaran.

METODE

Kajian ini mengadopsi desain kualitatif berparadigma interpretif dengan kerangka analisis wacana kritis (Wodak & Meyer, 2016). Pendekatan metodologis ini dipilih untuk mengonstruksi secara sistematis mekanisme pembentukan makna, relasi kuasa, dan strategi retorik yang memediasi kontestasi wacana populisme versus anti-populisme (Nadzier, 2022) dalam ekosistem digital Indonesia era pemerintahan Prabowo Subianto.

Unit analisis kajian difokuskan pada teks publik berupa pernyataan resmi PPS dan elite politiknya, konten platform media sosial terverifikasi, dan teks berita nasional periode 2024–2026. Sampel ditentukan melalui teknik purposif sampling, dengan parameter inklusi berbasis relevansi tematik terkait dinamika populisme versus anti-populisme mengacu pada relevansi tematik, intensitas sirkulasi, dan kapasitas representasional dalam memetakan narasi yang saling mengontestasi narasi yang bersifat kontestatif (Creswell & Poth, 2018).

Teknik analisis data mengadopsi model tiga dimensi, yakni analisis tekstual, analisis praktik diskursif, dan analisis praktik sosial. Sebelum dianalisis, data di-*coding* secara tematik untuk mengidentifikasi pola pembingkai, dikotomi identitas, dan mekanisme produksi makna. Data kemudian diinterpretasikan secara *iteratif* (berulang) guna menguji koherensi antara temuan empiris dan kerangka teoritis pascakebenaran (Miles et al., 2014).

Data disajikan secara naratif-tematik, dilengkapi matriks temuan dan kutipan langsung terkontekstualisasi. Format ini memfasilitasi pelacakan alur argumentasi, memastikan transparansi proses kodifikasi, serta memungkinkan verifikasi silang oleh pembaca akademik (Miles et al., 2014). Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber, refleksi peneliti, dan dokumentasi jejak analitis. Meskipun kajian ini bersifat eksploratif-kritis, hasil kajian dirancang untuk menyediakan kerangka evaluatif agar memungkinkan data diuji ulang (*iteratif*) dalam konteks politik digital yang terus tumbuh dan berkembang secara dinamis di Indonesia.

PEMBAHASAN

Politik Pascakebenaran dan Transformasi Produksi Kebenaran di Ruang Publik Digital

Transformasi komunikasi politik Indonesia era Presiden Prabowo Subianto (PPS) menunjukkan pergeseran signifikan dari model komunikasi deliberatif ke model komunikasi afektif yang berorientasi pada pengelolaan persepsi publik. Dalam konteks politik pascakebenaran (*post-truth politics*), efektivitas komunikasi politik tidak lagi ditentukan oleh konsistensi argumentasi rasional atau verifikasi faktual, melainkan oleh kemampuan narasi politik yang menghasilkan resonansi emosional, kedekatan simbolik, dan loyalitas identitas. Pergeseran ini berlangsung seiring berkembangnya ekosistem media sosial yang bekerja melalui logika viralitas dan amplifikasi algoritma. Di sini, pesan politik yang sederhana,



emosional, dan visual lebih mudah mendominasi ruang publik digital dibanding argumentasi kebijakan di ruang politik riil yang lebih kompleks dan dinamis.

Salah satu manifestasi penting dari transformasi digital tersebut tampak pada proses *rebranding* politik PPS selama dan pasca-pilpres 2024. Penelitian mengenai persona ‘Gemoy’ menunjukkan bahwa strategi komunikasi Prabowo secara sadar diarahkan untuk mengubah citra lama yang keras dan militeristik, untuk diubah menjadi figur yang lebih humoris, santai, dan dekat dengan anak muda. Strategi ini bekerja melalui produksi konten visual di TikTok, Instagram, dan Twitter/X yang menekankan ekspresi emosional, gestur tubuh, musik populer, dan simbol kedekatan personal. Studi Temby (2024) dan Djumadin (2025) menyebut bahwa framing ‘Gemoy’ tidak bertumpu pada argumentasi ideologis, tetapi pada manajemen emosi yang mampu menciptakan relasi emosional dengan pemilih muda.

Dalam perspektif komunikasi politik, gaya komunikasi semacam ini mencerminkan kecenderungan populisme digital, yakni praktik politik yang membangun legitimasi melalui simplifikasi isu, personalisasi kepemimpinan, dan artikulasi simbolik ‘pro-rakyat’. Retorika pidato Prabowo pasca-pelantikan mencerminkan dominasi unsur *pathos* (emosi) dibanding *logos* (penalaran), terutama melalui penggunaan humor, satire, gaya informal, dan metafora nasionalisme yang memberi tekanan berlebih pada loyalitas dan persatuan bangsa.

Studi Trisnaningtyas et al (2006) menemukan bahwa gaya komunikasi Prabowo secara konsisten diarahkan untuk membangun citra kepemimpinan komunikatif dan emosional guna memperkuat ikatan psikologis dengan khalayak. Di era *post-truth*, produksi komunikasi berbasis kedekatan emosional semacam ini sering kali lebih efektif secara politik dibanding penjelasan teknokratis yang kompleks dan lambat diterima publik digital.

Pada sisi lain, komunikasi politik pemerintahan Prabowo juga memperlihatkan intensifikasi simbol nasionalisme sebagai instrumen legitimasi. Editorial *The Jakarta Post* (2025) mencatat, bahwa narasi persatuan nasional dan stabilitas negara terus direproduksi Prabowo dalam berbagai pidato dan kebijakan pemerintahannya. Di sisi lain, Prabowo secara sadar dan konsisten membangun citra sebagai ‘*a nationalist figure*’ atau pembela persatuan nasional. Namun, simbolisme tersebut sering kali diikuti dengan konstruksi antagonisme terhadap pihak-pihak yang diposisikan sebagai pengganggu stabilitas nasional, termasuk kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan mahasiswa. Dalam kerangka teori populisme Laclau (2005), praktik ini menunjukkan bagaimana identitas ‘rakyat’ dikonstruksi melalui oposisi simbolik terhadap ‘yang lain’, sehingga komunikasi (politik) tidak hanya berfungsi sekedar alat penyampai pesan, tetapi juga alat pembentuk identitas politik kolektif.

Fenomena tersebut semakin diperkuat oleh struktur media digital yang memungkinkan reproduksi pesan politik di *upload* secara cepat dan masif, tanpa proses verifikasi. Laporan *Reuters* (2026) menunjukkan penggunaan kampanye disinformasi melalui media digital rata-rata ditujukan untuk mendiskreditkan kelompok kritis anti-rezim lewat labelisasi ‘agen asing’ atau ‘ancaman kepentingan negara’. Praktik tersebut menunjukkan bagaimana komunikasi politik digital dapat bergeser menjadi mekanisme kontrol persepsi dan marginalisasi wacana kritis, baik melalui manipulasi simbolik maupun eksploitasi sentimen publik.

Lewat eksploitasi sentimen publik, elite politik berupaya mengonstruksi hegemoni wacana di ruang digital dari arena pertukaran gagasan kritis ke dalam medan perebutan ‘makna kebenaran’ yang monopolistik dan hegemonik. Yang terjadi: otonomi khalayak dan integritas wacana demokrasi substantif direduksi. Dalam situasi ini, ruang publik digital tidak lagi sepenuhnya menjadi arena deliberasi gagasan atau fakta kritis, tetapi arena perebutan definisi ‘kebenaran politik’ dan ‘pelabelan’ versi kelompok elite dominan (Farid, 2023).



Di saat yang sama, gaya komunikasi jajaran elite pemerintahan Prabowo menunjukkan respons cepat untuk meredam isu, dibanding penjelasan faktual, jujur, dan argumentatif. Sejumlah pakar komunikasi menilai, para pembantu Prabowo mengalami krisis komunikasi publik karena sebagian pernyataannya lebih menonjolkan dimensi emotif, koersif, tidak peka (*tone-deaf*) ketimbang komunikasi persuasif, empatik, dan simpatik (ugm.ac.id, 2025). Dalam logika media sosial, komunikasi ala *tone-deaf* memang terlihat lebih interaktif dan responsif untuk penyebaran algoritma dibanding komunikasi kritis-reflektif. Namun, orang dengan gaya komunikasi *tone-deaf* sering melontarkan ucapan yang tidak pantas, nir-empati, dan non-empati atas isu-isu sensitif publik. Komunikasi politik elite Indonesia, seperti Prabowo, cenderung mengikuti teknik komunikasi *tone-deaf*, di mana kecepatan informasi dan viralitas isu menjadi ukuran ‘sukses komunikasi’ ketimbang kualitas argumen rasional.

Fenomena tersebut merefleksikan krisis rasionalitas dalam demokrasi digital, di mana dominasi konten afektif dan hiperpersonal mendegradasi kualitas deliberasi publik. Publik terperangkap dalam *echo chamber* dan bias konfirmasi, sehingga polarisasi opini menjadi tak terelakkan. Di Indonesia, polarisasi ini termanifestasi dalam delegitimasi data empiris pada survei Center for Economic and Law Studies (Celios) yang memberi nilai 3 dari skala 0-10 (alias ‘sangat buruk’) terhadap kinerja Presiden Prabowo. Skeptisisme terhadap objektivitas lembaga survei mengindikasikan pergeseran, bahwa legitimasi politik tidak lagi bertumpu pada akuntabilitas normatif, melainkan pada keacnggihan manajemen persepsi simbolik dan rekayasa algoritmik guna mengonsolidasi dukungan rakyat (bbc.com, 2025).

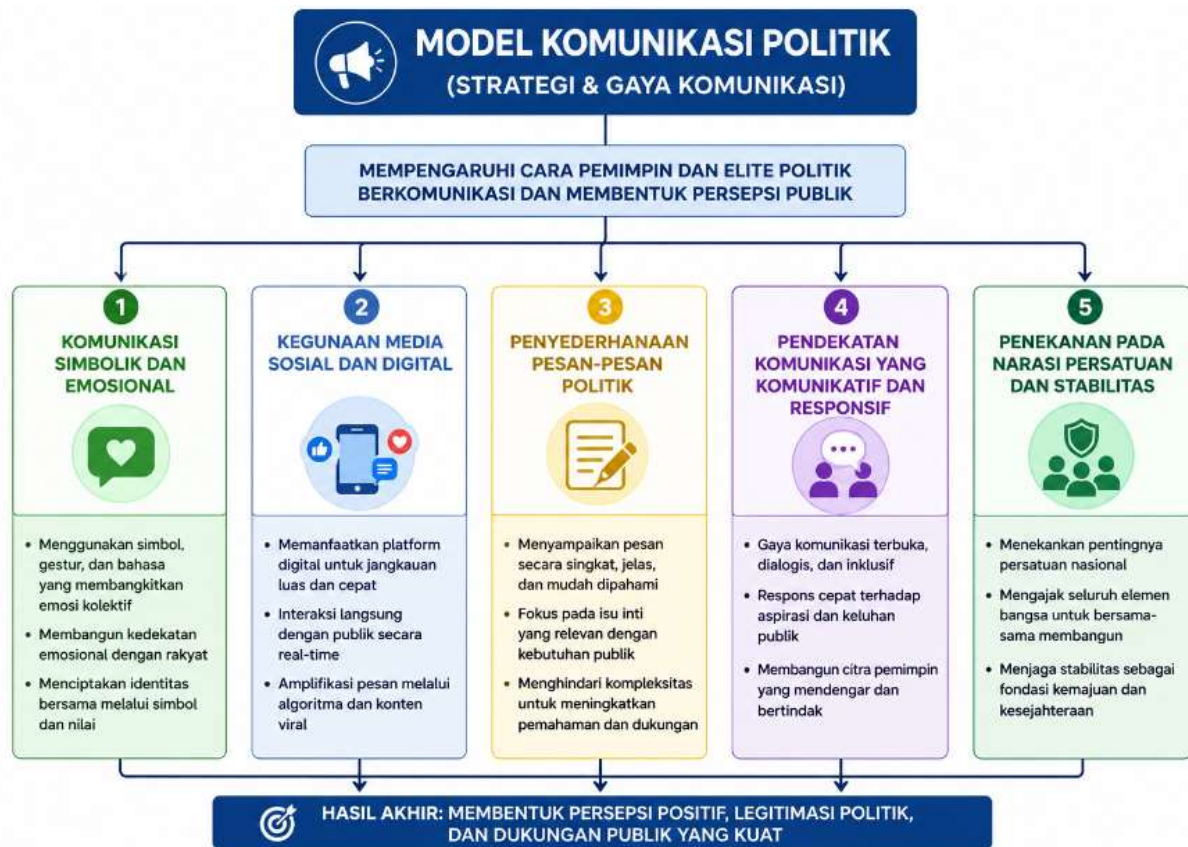
Gaya komunikasi elite era Prabowo jelas merepresentasi kristalisasi populisme digital yang mengoperasionalkan politik afeksi dan simbolisme nasionalisme sebagai instrumen hegemonik. Dalam epistemologi pascakebenaran, validitas faktual tereliminasi oleh narasi yang bisa memicu resonansi viral, sehingga kebenaran politik direkonstruksi lewat logika algoritmik ketimbang verifikasi empiris. Dinamika ini mendegradasi rasionalitas publik, mempertajam polarisasi, sekaligus mengaburkan batas demarkasi antara deliberasi substantif dan manajemen persepsi. Akibatnya, ruang demokratis kerap terbelah dalam kubangan kontestasi identitas dan emosi yang rentan dimanipulasi secara terstruktur oleh elite penguasa.

Diskursus Kekuasaan dan Strategi Legitimasi Politik dalam Kemasan Narasi Populis

Periode awal kepemimpinan Prabowo—pasca kemenangannya pada pilpres 2024 lalu—menjadi tonggak penting dalam menentukan orientasi kebijakan politik pemerintah. Model komunikasi yang dipilih untuk ditetapkan sebagai format komunikasi politik pemerintah, tentu akan memberi dampak signifikan pada persepsi publik, stabilitas politik, dan efektivitas agenda kebijakan nasional. Beberapa poin penting coba penulis petakan terkait model komunikasi politik Prabowo pasca pelantikan dirinya sebagai presiden (lihat gambar 1).

Meminjam tesis Foucault (1980), kekuasaan pada rezim *post-truth* tidak semata bekerja lewat instrumen koersif negara, tetapi melalui produksi wacana yang menentukan batas antara apa yang dianggap benar, rasional, dan sah versus apa yang dianggap salah, irasional, dan ilegal. Di era kepemimpinan Prabowo, praktik komunikasi politik kadang memperlihatkan kecenderungan kuat menuju pembentukan *regime of truth*, yakni mekanisme produksi narasi dominan yang mengaitkan legitimasi pemerintahan dengan stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan persatuan bangsa sebagai framing utama.

Dalam konteks ini, komunikasi politik tidak hanya berfungsi sebagai saluran kebijakan, tetapi juga konstruksi hegemoni wacana publik yang menetapkan oposisi biner: siapa aktor yang dianggap konstruktif dan patriotik, atau sebaliknya, lawan politik distigma, dilabel atau diposisikan sebagai ancaman ‘kepentingan nasional’ (Syukri et al., 2025).



Gambar 1. Model dan Gaya Komunikasi Politik Prabowo

Sumber: Data diolah penulis

Salah satu karakter utama komunikasi politik Prabowo adalah penekanan pada retorika stabilitas politik dan nasionalisme ekonomi. Dalam pidato kenegaraan dan pernyataan di forum resmi, Prabowo kerap menyebut agenda pemerintahnya adalah mempertahankan kedaulatan nasional dan memperbaiki ‘kebocoran’ ekonomi negara. Dalam pidatonya di DPR (Mei 2026 lalu) misalnya, Prabowo menyebut: (1) Indonesia kehilangan 343 miliar US dolar akibat praktik *under invoicing* dan *transfer pricing*; (2) [untuk itu] pemerintah akan memperketat tata kelola ekspor sumber daya alam melalui BUMN eksportir tunggal; (3) Prabowo juga menegaskan Pasal 33 UUD 1945 harus kembali menjadi fondasi utama sistem ekonomi Indonesia (infobanknews.com, 2026). Narasi Prabowo di atas menunjukkan bagaimana pembangunan ekonomi diproduksi bukan sekadar sebagai kontrol kebijakan teknokratis negara, tetapi sebagai ‘proyek patriotik’ yang menempatkan posisi pemerintah sebagai pelindung kepentingan nasional dari ancaman pengusaha rente dan oligarki global.

Strategi komunikasi Prabowo adalah bentuk normalisasi politik wacana yang beroperasi di bawah logika produksi pengetahuan (berbasis kepentingan politik atau ideologi tertentu). Rezim Praboso tidak hanya menawarkan solusi ekonomi, tetapi juga membentuk definisi mengenai ‘kepentingan bangsa’ dan siapa yang layak dipercaya untuk menjaganya. Media sosial pemerintah, pidato elite, dan jaringan media arus utama akan dimobilisasi untuk mereproduksi citra Prabowo sebagai figur pemimpin yang nasionalis, pro-rakyat. Di sini, relasi kuasa bekerja senyap lewat simbol, repetisi narasi, dan reproduksi citra kepemimpinan Prabowo yang terus-menerus dikaitkan dengan stabilitas nasional (Soeharno et al., 2025).

Namun, produksi legitimasi tersebut juga disertai tendensi mendisiplinkan kritik publik melalui representasi antagonistik terhadap oposisi publik. Fenomena ini terlihat jelas dalam respons pemerintah terhadap gelombang demonstrasi #IndonesiaGelap pada Februari 2025.



Demonstrasi yang dipicu oleh kebijakan efisiensi anggaran dan program Makan Bergizi Gratis berkembang menjadi kritik luas terhadap arah pemerintahan Prabowo-Gibran. Data digital menunjukkan bahwa tagar #IndonesiaGelap memperoleh jutaan interaksi di platform X dengan dominasi sentimen negatif mencapai 81%. Akan tetapi, alih-alih diperlakukan sebagai bentuk partisipasi demokratis, sebagian kritik publik tersebut justru di frame sebagai tindakan politik provokatif yang mengganggu stabilitas politik nasional (monash.edu, 2025).

Praktik delegitimasi terhadap kritik semakin terlihat dalam berbagai pernyataan elite pemerintah yang mengaitkan demonstrasi mahasiswa atau oposisi sosial dengan ‘campur tangan asing’. Dalam sebuah rapat koordinasi nasional Februari 2026, Prabowo menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang berulang kali kemungkinan “dikendalikan oleh kekuatan asing”. Pernyataan semacam ini memiliki implikasi wacana serius karena menggeser posisi kritik dari wilayah deliberasi demokratis kepada ancaman negara pada kelompok kritis. Dalam analisis Foucault (1980), mekanisme ini merupakan bentuk *discursive exclusion*, yaitu proses pengucilan simbolik (*symbolic exclusion*) atas narasi alternatif melalui framing negatif ‘berbahaya’, ‘subversif’, atau ‘anti-pemerintah’ (bbc.com, 2026).

Kecenderungan ini diperkuat oleh laporan Amnesty International (AI) yang menyoroti penggunaan kampanye disinformasi digital untuk melabeli mahasiswa, aktivis, jurnalis, dan organ masyarakat sipil sebagai ‘agen asing’ (amnesty.org, 2026). Investigasi AI menemukan sejumlah akun media sosial yang terafiliasi dengan unit militer dan jaringan politik tertentu secara sistematis menyebarkan narasi negatif terkait kritik publik pada pemerintah. Dalam teori diskursus kekuasaan, praktik ini menunjukkan bagaimana komunikasi politik tidak lagi berdiri netral, melainkan menjadi alat produksi kebenaran politik yang bertujuan menekan opini, mengontrol persepsi sekaligus mempersempit ruang gerak oposisi.

Lebih jauh, logika media digital memperkuat efektivitas strategi komunikasi tersebut. Dalam ekosistem algoritmik, narasi berciri afektif, nasionalistik, dan antagonistik lebih mudah viral dibanding wacana yang argumentatif, kritis, dan reflektif. Akibatnya, ruang publik digital di Indonesia semakin bergerak menuju arena kompetisi afeksi dan politik simbolis. Pemerintah tentu meraih keuntungan besar dari kemampuan memobilisasi loyalitas emosional melalui citra patriotisme, stabilitas, dan pembangunan nasional, sementara kritik publik sering kali mendapat tekanan aparat, ancaman suspend, atau serangan hacker. Dalam konteks ini, kekuasaan bekerja tidak hanya melalui institusi formal negara, tetapi juga koersi dan sirkulasi algoritmik yang memperkuat visibilitas narasi dominan.

Faktual, gaya komunikasi Presiden Prabowo dan elite politik Indonesia menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui produksi dan normalisasi wacana; diproduksi bersama oleh arsitektur platform yang memperkuat narasi dominan, mengubah keterlibatan afektif menjadi mata uang utama pengaruh politik. Narasi stabilitas, pembangunan, dan nasionalisme tidak hanya berfungsi sebagai wacana politik, tetapi sebagai mekanisme legitimasi yang membentuk persepsi kolektif mengenai kebenaran dan kepentingan nasional.

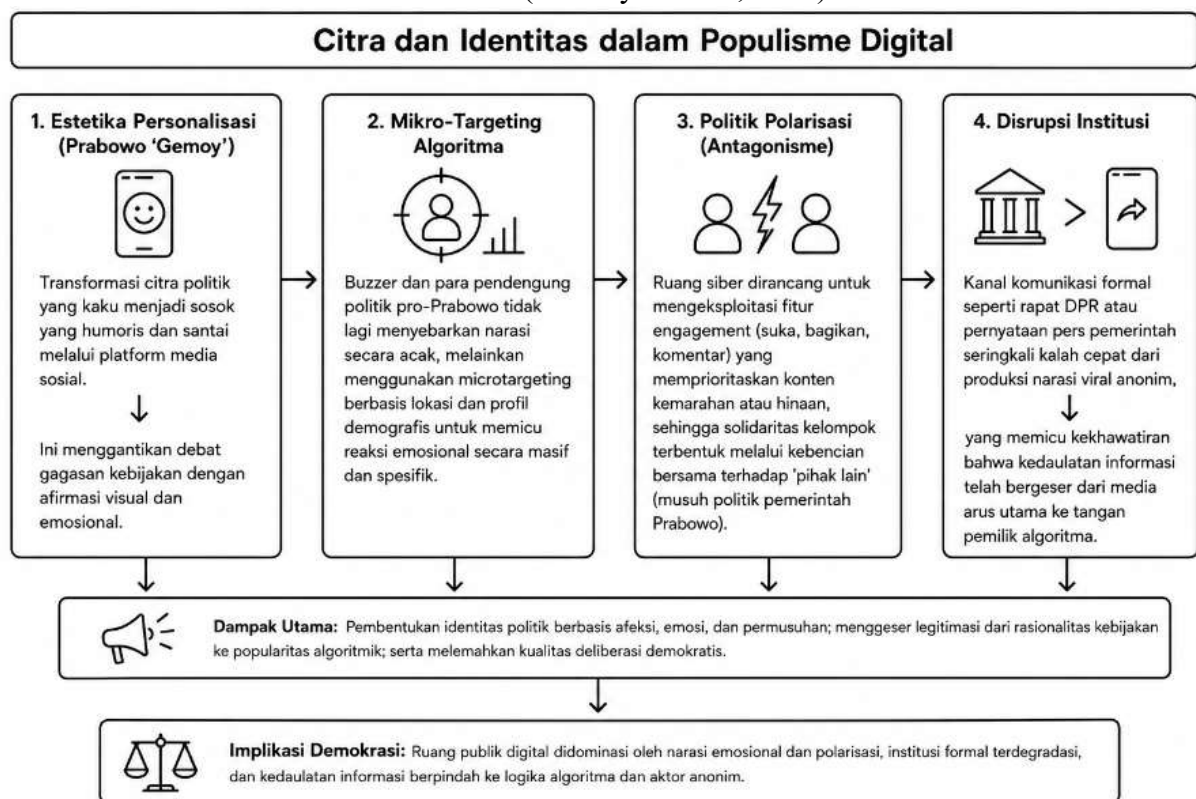
Pada sisi lain, representasi kritik sebagai ancaman terhadap stabilitas memperlihatkan tendensi pengendalian opini publik melalui kontrol media, khususnya media sosial. Dalam lanskap politik pascakebenaran dan struktur media digital yang polaritatif dan fragmentatif, komunikasi politik akhirnya menjadi arena utama produksi kekuasaan simbolik dan hegemoni diskursif, di mana legitimasi pemerintah semakin bergantung pada kemampuan dalam mengelola persepsi, kapasitas dalam *manage* resonansi emosi, mengonstruksi opini, serta mendefinisi ‘kebenaran politik’ secara mandiri—sesuai kepentingan elite.



Konstruksi Identitas ‘Rakyat’ dan Antagonisme Politik dalam Populisme Digital

Subtema kajian ini ditujukan untuk menyelami bagaimana komunikasi politik era Prabowo bekerja melalui produksi identitas kolektif dan pembelahan simbolik di ruang publik digital. Dalam perspektif Laclau (2005), populisme dibangun melalui artikulasi ‘rakyat’ yang disatukan oleh rasa keterancaman bersama terhadap ‘oligarki’, ‘elite asing’, atau kelompok-kelompok kritis tertentu yang diposisikan sebagai lawan simbolik.

Di era digital, proses konstruksi politik tidak lagi sepenuhnya dimediasi (atau di bawah pengawasan) institusi resmi, namun beroperasi lewat algoritma hasil disain media sosial, *buzzer* politik, meme, dan reproduksi narasi yang mempercepat pembentukan solidaritas emosional dan antagonisme politik. Fenomena ini dikenal sebagai *algorithmic democracy*—di mana ruang publik dikendalikan narasi viral yang mengaburkan batas antara kebenaran versus sensasi. Di sini, pembentukan opini publik tidak lagi bertumpu pada diskursus rasional atau informasi faktual di bawah kendali institusi formal (Assadiyah et al., 2025).



Gambar 2. Konstruksi Citra dan Identitas Prabowo Subianto

Sumber: Data diolah penulis

Dalam konteks pemerintahan Prabowo, konstruksi identitas ‘rakyat’ kerap diproduksi lewat simbol kedekatan personal, nasionalisme populis, dan citra pemimpin ‘merakyat’. Kajian Aviansyah et al (2025) dan Yulianti et al (2024) menunjukkan, konstruksi atau *personal branding* Prabowo di platform media sosial bukan sekadar strategi pencitraan elektoral, melainkan bagian dari politik afeksi (*affective politics*): membangun identifikasi emosional antara pemimpin dan publik. Prabowo ‘Gemoy’ misalnya, diproduksi dengan narasi humoris, santai, dan informal untuk menegaskan bahwa Prabowo adalah representasi ‘rakyat biasa’. Dalam populisme digital, identitas rakyat dibangun bukan terutama melalui program ideologis pro-rakyat, tetapi melalui kedekatan emosional, argumen virtual, dan performativitas visual yang mudah direplikasi dalam kultur media sosial.



Konstruksi identitas populis juga diperkuat oleh *buzzer* politik, influencer, dan jaringan para aktor komunikasi digital pendukung pemerintah. Studi mengenai peran *buzzer* politik Prabowo menunjukkan bahwa media sosial hanya digunakan untuk membentuk opini publik melalui distribusi konten bernuansa identitas, slogan emosional, dan narasi dukungan yang mempertegas batas antara ‘kami’ dan ‘mereka’ (Seah, 2024; Assadiyah et al., 2025). Dalam praktik, antagonisme politik tidak hanya diarahkan pada oposisi formal, tetapi juga pada kelompok masyarakat sipil, aktivis, mahasiswa, atau warganet yang dianggap menghambat stabilitas politik pemerintah. Situasi ini memperlihatkan bagaimana populisme digital bekerja melalui logika polarisasi afektif, yakni membentuk loyalitas politik berbasis identitas emosional; bukan sekadar kesepakatan rasional atas kebijakan publik.

Fenomena antagonisme politik semakin terlihat dalam dinamika resistensi digital selama awal pemerintahan Prabowo. Viralitas gerakan tagar #KaburAjaDulu dan tagar #IndonesiaGelap menunjukkan, bagaimana media sosial menjadi arena pertarungan antara optimisme pemerintah versus kekecewaan publik. Kajian Octaviani et al (2025), Lauren et al (2025), dan laporan *Reuters* (2025) menemukan bahwa tagar #KaburAjaDulu dan #IndonesiaGelap berkembang sebagai simbol resistensi digital terhadap kondisi sosial-politik yang dianggap mengunci partisipasi dan mobilitas sosial bagi generasi muda. Menariknya, respons pemerintah justru membingkai dalam dikotomi nasionalistik. Para pengkritik dilabel sebagai kelompok pesimistis, anti-negara, dan pro-asing. Antagonisme politik diproduksi lewat kategorisasi moral terkait siapa yang dianggap ‘rakyat sejati’ dan siapa yang diposisikan sebagai ancaman (‘simbolik’) terhadap persatuan nasional (Ardianti et al., 2025).

Dalam konteks media digital, proses antagonisasi tersebut diperkuat oleh algoritma platform media sosial yang cenderung mengamplifikasi konten emosional dan pragmatif. Studi tentang populisme digital menunjukkan bahwa konten yang mengandung konflik identitas, kemarahan, atau humor sarkastik memiliki tingkat keterlibatan (*engagement*) publik yang lebih tinggi dibanding diskursus kebijakan yang bersifat teknokratis. Akibatnya, ruang publik digital semakin dipenuhi praktik komunikasi politik yang menekankan performativitas emosi-identitas ketimbang argumentasi kritis-rasional. Dalam situasi tersebut, *retweet*, meme, atau potongan video politik tidak lagi berfungsi sekadar penyebar informasi, tetapi menjadi instrumen produksi simbolik solidaritas kelompok dan delegitimasi lawan politik.

Survei nasional menunjukkan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo tetap berjalan seiring dengan meningkatnya polarisasi wacana di media sosial. Meski tingkat kepuasan berada di kisaran 75-78% (Poltracking), bahkan 79,9% (Indikator Politik), namun *approval rating* itu tetap berada di bawah bayang-bayang demonstrasi mahasiswa, kritik masyarakat sipil, dan komunikasi publik elite politik yang syarat kontroversi. Kondisi ini menunjukkan, bahwa populisme digital bekerja secara paradoks: di satu sisi memperkuat kinerja legitimasi simbolik pemerintah, namun di sisi lain memperdalam fragmentasi ruang publik melalui reproduksi antagonisme politik yang berkelanjutan (kompas.com, 2026).

Konstruksi identitas ‘rakyat’ dalam populisme digital era Prabowo, tidak dapat dipahami semata sebagai strategi komunikasi publik pemerintah, melainkan mekanisme produksi hegemoni simbolik di ruang publik digital. Identitas rakyat dibentuk melalui narasi nasionalisme, kedekatan emosional, dan oposisi terhadap kelompok yang diposisikan sebagai ancaman terhadap stabilitas atau kepentingan nasional. Dalam kondisi tersebut, media sosial berfungsi bukan hanya sebagai medium komunikasi politik, tetapi juga sebagai arena produksi emosi kolektif, polarisasi identitas, dan normalisasi antagonisme yang berimplikasi langsung terhadap kualitas dan kinerja demokrasi Indonesia.



Polarisasi Wacana dan Krisis Rasionalitas di Bawah Kepemimpinan Prabowo

Polarisasi wacana politik era Prabowo ditandai oleh degradasi ruang publik (polarisasi dan fragmentasi) yang menggerus rasionalitas publik. Isu sensitif yang kerap memicu polarisasi dan fragmentasi berkisar pada sensitivitas dan sikap anti-kritik Prabowo sendiri. Respons *nyinyir* dan sensasional yang menjadi andalan Prabowo dan jajarannya kian memperkuat bias konfirmasi, memicu konflik, dan memantik polarisasi. Isu intensifikasi ‘pakar sok pintar’ atau ‘suka *nyinyir*’ kian mengerdilkan kritisisme publik. Bagi Prabowo, meminggirkan nalar kritis publik sambil memobilisasi loyalitas mereka jauh lebih penting sebagai modal politik elektoral 2029, dus alat legitimasi politik rezimnya (Hardi, 2025).

Dalam *The Disinformation Age* (2018), Bennett dan Livingston memberi peta analisis baru, bahwa digitalisasi demokrasi berpotensi menghasilkan ekosistem komunikasi yang memperkuat disinformasi, *echo chamber*, konfirmasi bias, dan fragmentasi epistemik. Penyebaran disinformasi—seperti diakui Bennett dan Livingston—telah merusak norma dan nilai dasar yang menjadi landasan legitimasi institusional dan stabilitas politik; melemahkan lembaga-lembaga otoritatif—seperti partai politik, lembaga pemilihan umum, organisasi publik, sains, jurnalisme independen, dan kelompok masyarakat sipil. Di Indonesia, fenomena disinformasi ini tampak dari maraknya reproduksi narasi simplistik, seperti isu ‘pendukung rakyat’ versus ‘pengkhianat bangsa’, ‘nasionalis’ versus ‘anti-negara’ yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Narasi tersebut tidak hanya diproduksi oleh *buzzer* bayaran, *influencer* politik, atau akun-akun bot, tetapi juga direplikasi secara organik oleh komunitas digital partisan yang kian mempersempit ruang dialog reflektif-rasional (Al Fatih, 2024).

Fenomena itu, secara empirik, tampak dari intensitas kritik publik terhadap dinamika politik Indonesia sepanjang tahun 2025–2026. Data percakapan digital di ruang media sosial terkait kritik atas kebijakan pemerintah—seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), erosi kebebasan pers dan sipil, serta pola responsif ‘viral dulu, baru dicabut’—menunjukkan asimetri informasi yang signifikan. Munculnya fenomena podcast dan pakar ‘informatif semu’, klarifikasi narasi DPR yang inkonsisten, polemik pelabelan ‘antek Asing’, revisi kebijakan fiskal, hingga isu demonstrasi mahasiswa, mengindikasikan tingginya fragmentasi dan polarisasi politik publik. Dinamika ini merefleksikan kuatnya *public trust* di masa-masa awal kekuasaan Prabowo, di mana legitimasi otoritas terus dinegosiasikan melalui konflik interpretatif yang tajam di ranah digital (thecolumnist.id, 2026).

Menguatnya perlawanan publik di ruang digital ditandai oleh gerakan protes jaringan (*networked protest*) yang diinisiasi oleh Generasi Z dan milenial. Perdebatan di ruang digital tersebut bukan tumbuh sebagai diskursus rasional-deliberatif, melainkan sebagai arena pertarungan identitas politik sengit antara kelompok pro-pemerintah dan kelompok oposisi; antara rakyat dan penguasa. Dalam konteks ini, media sosial telah mengambil alih fungsi alternatif kelompok oposisi yang selama ini dikenal efektif dalam menekan pemerintah untuk mengevaluasi atau membatalkan kebijakan publik yang dianggap kontroversial (kompas.id, 2025; Hidayat et al., 2025).

Gaya komunikasi para Menteri Kabinet Prabowo juga ikut berkontribusi terhadap reproduksi fragmentasi dan polarisasi tersebut. Sejumlah pidato dan pernyataan mereka diantaranya adalah usulan Menteri PPPA terkait relokasi gerbong kereta wanita, usulan tambahan anggaran fantastis dari Menteri HAM, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan Menko Yusril Ihza Mahendra yang menyebut Tragedi 1998 bukan kategori pelanggaran HAM berat, penggunaan kop kementerian untuk acara keluarga, hingga insiden salah sebut data desa oleh Menko Pangan (bbc.com, 2024). Tingginya frekuensi pernyataan blunder para



pembantu presiden ini membuat Prabowo secara terbuka mengakui buruknya komunikasi jajaran pemerintah, dan presiden bertanggung jawab atas hal itu.

Di sisi lain, platform media digital arus utama terus mengonstruksi hiperrealitas politik dengan mendorong performativitas simbolik ketimbang substansi kebijakan. Dinamika ini menandai penguatan logika politik afektif, di mana mobilisasi dukungan digerakan oleh resonansi emosional, bukan oleh argumen kritis-rasional. Studi populisme digital dari Lim (2017), Bennet dan Livingston (2020), dan Djumadin (2025) menegaskan bahwa efektivitas komunikasi dalam ekosistem media digital berciri afektif-populism di Indonesia bertumpu sepenuhnya pada logika algoritmik—seperti viralitas politik humoristik ‘Prabowo Gemoy’. Padahal logika algoritmik secara inheren potensial mereduksi kompleksitas argumentasi kritis-rasional demi maksimalkan keterlibatan emosional publik (*engagement*).

Dominasi logika algoritmik memiliki implikasi serius terhadap menguatnya polarisasi wacana dan menjamurnya krisis rasionalitas publik; dan ujungnya pada menurunnya kualitas dan kinerja demokrasi. Polarisasi wacana yang terus direproduksi media digital berpotensi menyebabkan ruang publik menjadi ‘arena fitnah’ dan ‘koersi politik’. Publik lebih mudah dijebak oleh informasi selektif yang memperkuat identitas kelompok dan mengurangi kapasitas kritis-reflektif terkait kebijakan politik negara yang kompleks.

Akibatnya, demokrasi Indonesia berisiko mengalami *epistemic crisis*, yakni satu kondisi ketika masyarakat kehilangan basis pengetahuan bersama untuk membangun konsensus politik. Realitas yang terfragmentasi menghambat terbentuknya kesepakatan dasar mengenai fakta, sehingga deliberasi publik menjadi mustahil. Tanpa kebenaran faktual yang diakui bersama, argumen rasional tergantikan oleh klaim identitas yang saling bertolak belakang. Hal ini akan memicu stagnasi kebijakan karena setiap pihak beroperasi dalam ekosistem informasi yang tertutup dan *self-reinforcing*.

Media arus utama kehilangan fungsi sebagai penjaga gawang (*gatekeeper*), digantikan oleh *buzzer* dan *influencer* yang gemar memvalidasi bias konfirmasi. Institusi pendidikan dan ilmiah pun kerap diserang kredibilitasnya ketika temuan mereka bertentangan dengan narasi populer di media sosial. Dalam jangka panjang, fragmentasi epistemik semacam ini dapat memperkuat *distrust* terhadap institusi demokrasi, media independen, maupun kritik yang dinarasikan para ahli. Warga negara menjadi apatis atau radikal karena tidak lagi merasa melaiki saluran atau arena dialog yang bisa menghasilkan pemahaman bersama.

Legitimasi pemerintahan akhirnya bergantung pada manipulasi persepsi semata, bukan pada kinerja substantif yang dapat diverifikasi secara objektif. Kondisi ini membuka jalan bagi otoritarianisme digital, di mana kebenaran didefinisikan secara sepihak oleh pengelola algoritma dan penyusun narasi. Akhirnya, kualitas demokrasi menurun drastis karena pemilu dan pengawasan publik tidak lagi berbasis pada evaluasi kebijakan rasional, melainkan pada loyalitas personal dan tribalisme digital yang subjektif dan irrasional.

Faktual, polarisasi wacana di bawah kepemimpinan Prabowo tidak dapat dipahami sebagai konsekuensi spontan perkembangan media digital, melainkan sebagai hasil interaksi antara strategi komunikasi populis, logika algoritmik serta produksi narasi politik berciri identitas dan emosi. Di altar pascakebenaran, komunikasi politik praktis semakin bergantung pada kemampuan mengelola emosi kolektif dan loyalitas identitas, sementara rasionalitas deliberatif semakin terdesak oleh kompetisi performatif yang terus diproduksi media digital.



KESIMPULAN

Era kepemimpinan Prabowo Subianto merefleksikan manipulasi produksi kebenaran di ruang-ruang digital. Dalam lanskap politik pascakebenaran, narasi politik tidak lagi dinilai berdasarkan validitas empiris, melainkan yang bisa memicu viralitas dan resonansi. Fakta ini menandai pergeseran epistemik mendasar: menggeser epistemologi publik dari deliberasi rasional menuju konsensus berbasis viralitas dan resonansi emosi. Realitas ini berpotensi mendekonstruksi verifikasi, merusak argumen, dan memarjinalisasi sikap kritis-reflektif, serta mengaburkan batas antara opini (subjektif) dan fakta (objektif).

Strategi legitimasi politik kerap dikemas lewat narasi populisme yang men-simplifikasi kompleksitas kebijakan politik negara sebagai ‘urusan kami’ dan bukan ‘urusan publik’. Para elite memanfaatkan infrastruktur digital untuk mem-*bypass* partisipasi politik publik sambil mengonsolidasi dukungan lewat repetisi pesan-pesan politik yang anti-kritik dan berciri segregatif. Mekanisme ini praktis telah mengubah komunikasi publik pemerintahan dari instrumen akuntabilitas publik menjadi sekedar industri pengelola opini publik.

Konstruksi identitas ‘rakyat’ direkonfigurasi melalui antagonisme politik digital yang tajam. Populisme era ini tidak hanya mempersatukan, tetapi juga secara aktif memproduksi ‘lawan’ untuk memperkuat kohesi internal kelompok. Simbol-simbol identitas dimobilisasi untuk menciptakan batas eksklusif antara ‘kami’ yang patriotik dan ‘mereka’ yang anti-stabilitas. Solidaritas politik dikonstruksi lewat tesis oposisi biner: ‘kami’ dan ‘mereka’.

Dinamika ini memicu polarisasi wacana yang mendalam dan krisis rasionalitas publik. Di bawah kepemimpinan Prabowo, ruang deliberasi praktis telah terdegradasi menjadi *echo chamber* dan ruang algoritmik yang memperkuat bias konfirmasi. Argumen rasional kalah oleh seruan emosi dan penyebaran wacana ‘antek asing’. Publik terjebak dalam realitas politik ambigu, yang menghambat kemungkinan dialog konstruktif antar-kelompok politik.

Secara keseluruhan, kontestasi ini mengungkap kerentanan demokrasi Indonesia terhadap manipulasi persepsi dan rekayasa opini yang dikondisikan secara sistemik dan terstruktur oleh aparaturnya. Tanpa revitalisasi etika komunikasi dan literasi kritis, hegemoni narasi populis, ke depan, berisiko menggerus habis otonomi rasional warga negara. Urgensi utama terletak pada pemulihan integritas diskursif untuk mencegah degradasi lebih lanjut terhadap kualitas pemerintahan dan ruang publik demokratis.

Dengan kata lain, tantangan utama demokrasi Indonesia ke depan adalah bagaimana elemen-elemen demokrasi mampu merevitalisasi ruang publik yang terbelah menjadi ruang publik yang kohesif, rasional, reflektif, dan berbasis argumen kritis. Sebab, di tengah dominasi ekosistem politik subjektif-emosional serta fragmentasi dan polarisasi politik digital yang semakin mendegradasi wajah demokrasi substantif, upaya ini menjadi sangat relevan untuk mengatasi krisis kepercayaan publik yang makin sumir pada pemerintahan Prabowo.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Bennett, W. L., & Livingston, S. (eds.). (2020). *The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th eds.). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.



- Foucault, M. (1980) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977* (Edited and Translated by C. Gordon, L. M. J. Mepham, & K. Soper). New York: Pantheon Books.
- Fuchs, C. (2024) Critical Theory Foundations of Digital Capitalism: A Critical Political Economy Perspective. *Journal for a Global Sustainable Information Society*, 22(1), 148-196. doi: 10.31269/triplec.v22i1.1454.
- Harsin, J. (2024) “Post-truth Politics and Epistemic Populism: About (Dis-)Trusted Presentation and Communication of Facts, Not False Information” In: Saul Newman & Maximilian Conrad (eds.) *Post-Truth Populism: A New Political Paradigm* (European Political Sociology). Switzerland: Palgrave (pp. 25-64).
- Hadiz, V. R. (2016) *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Laclau, E. (2005) *On Populist Reason*. Accessed by <https://voidnetwork.gr/wp-content/uploads/2016/09/On-Populist-Reason-by-Ernesto-Laclau.pdf>
- McIntyre, L. (2018) *Post-truth*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Miles, M. B. et al. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd eds.). Accessed by <https://www.metodos.work/wp-content/uploads/2024/01/Qualitative-Data-Analysis.pdf>.
- Mudde, C., & Kaltwasser, C. R. (2017) *Populism: A Very Short Introduction*. Accessed by https://www2.daad.de/medien/mudde_rovira_kaltwasser_2017_populism.pdf.
- Wodak, R., & Meyer, M. (eds.) (2016). *Methods of Critical Discourse Studies* (3rd eds.). Accessed by https://coehuman.uodiyala.edu.iq/uploads/pdf/English_library.
- Online (Journal)**
- Al Fatih, I. Z. (2024) Peran Media Sosial dalam Kampanye Politik di Indonesia Lima Tahun Terakhir: Antara Demokrasi dan Manipulasi Informasi. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(7), doi: 10.59141/comserva.v4i7.2611. 2227-2237.
- Ardianti, R. et al.(2025) #KaburAjaDulu: A Digital Manifestation of Indonesian Youth’s Response to Societal and Structural Crises. *EDUCATION: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2), 137-151. doi: 10.51903/fbjkq235.
- Assadiyah, D. et al. (2025) Peran Buzzer Politik Prabowo dalam Pembentukan Opini Publik di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 53-59. doi: 10.31294/jkom.v16i1.12092.
- Aviansyah, M. A. et al. (2025) Political Branding “Gemoy”: Image Construction of Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming in the 2024 Presidential Election. *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 197-207. doi: 10.65310/kzxkhr27.
- Bennett, W. L., & Livingston, S. (eds.). (2020). *The Disinformation Age: Politics, Technology, and Disruptive Communication in the United States*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018) *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th eds.). Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.
- Djumadin, Z. (2025) Digital Populism And Affective Politics: The Case of Prabowo Subianto’s ‘Gemoy’ Persona and its Resonance With Millennial and Gen-Z Voters in Indonesia. *Lex localis: Journal of Local Self-Government*, 23(11), 849-865. doi: 10.52152/801942.
- Farid, M. (2023) The Digital Public Sphere And The Face of Indonesian Political Education. *AL-WIJDÂN: Journal of Islamic Education Studies*, 8(3), 417–427. doi: 10.58788/alwijdn.v8i3.2658.



- Harsin, J. (2024) "Post-truth Politics and Epistemic Populism: About (Dis-)Trusted Presentation and Communication of Facts, Not False Information" In: Saul Newman & Maximilian Conrad (eds.) *Post-Truth Populism: A New Political Paradigm* (European Political Sociology). Switzerland: Palgrave (pp. 25-64).
- Hadiz, V. R. (2016) *Islamic Populism in Indonesia and the Middle East*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hidyatat, R. et al. (2025) Peran Media Sosial Dalam Mengkonstruksi Opini Publik Terkait Kebijakan Pemerintah: Studi Kasus Wacana Publik Tahun 2025. *CORE: Journal of Communication Research*, 3(2), 64-74. doi: 10.47650/core.v3i2.2223.
- Jagers, J. & Walgrave, S. (2007) Populism as Political Communication Style: An Empirical Study of Political Parties' Discourse in Belgium. *European Journal of Political Research*, 46(3), 319-345. doi: 10.1111/j.1475-6765.2006.00690.x.
- Lauren, A. et al. (2025) Makna Tren #Kaburajadulu dalam Mendorong Keinginan Migrasi Generasi Muda di Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2620-2628. Retrieved from <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/352>.
- Lim, M. (2017) Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal Nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(2), 411-427. doi: 10.1080/14672715.2017.1341188.
- Mietzner, M. (2020) Rival Populisms and the Democratic Crisis in Indonesia. *Australian Journal of International Affairs*, 74(2), 1-19. doi: 10.1080/10357718.2020.1725426.
- Moffitt, B. (2018) The Populism/Anti-Populism Divide in Western Europe. *Democratic Theory: An Interdisciplinary Journal*, 5(2), 1-16. doi: 10.3167/dt.2018.050202.
- Nadzir, I. (2022) Performative Politics And Digital Populism In Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), 73-92. doi: 10.14203/jpp.v19i2.1131.
- Octaviani, B. D. et al. (2025) #Kaburajadulu: Resistensi Kultural dan Aspirasi Mobilitas Generasi Muda di X. *Jurnal Riset Jurnalistik dan Media Digital (JRJMD)*, 5(1), 99-110. doi: 10.29313/jrjmd.v5i1.6934.
- Soeharno, A. et al. (2025) A Political Communication Analysis of Prabowo Subianto's First Official Speech. *Politico: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 25(2), 239-252. doi: 10.32528/politico.v25i2.4134.
- Sunstein, C. R. (2018) #Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. *American Political Thought*, 7(2), 370-373. doi: 10.1086/696988.
- Stavrakakis, Y. (2014) The Return of "the People": Populism and Anti-Populism in the Shadow of the European Crisis. *Constellations*, 21(4), 505-517. doi: 10.1111/1467-8675.12127.
- Triningtyas, F. et al. (2026) Membangun Narasi Politik: Studi Retorika Pidato Presiden Prabowo Subianto. (2026). *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 8(2), 306-324. doi: 10.24076/pikma.2026v8i2.2333.
- Yulianti, E. et al. (2024). Strategi Personal Branding Prabowo Subianto dalam Membangun Citra Politik di Media Sosial Instagram. *Communication & Design Journal*, 1(1), 15-30. Retrieved from <https://ojs.sains.ac.id/index.php/commdes/article/view/8/55>.
- Online (Article in Website)**
- Adam, Alifian (2023, December 11) *Era Digital: Pengertian, Kelebihan dan 4 Dampaknya*. Available at <https://accurate.id/teknologi/era-digital/>
- amnesty.org (2026, May 19) Indonesia: "Building up Imaginary Enemies": Misinformation, Disinformation and 'Foreign Agent' Allegations in President Prabowo's Indonesia. Accessed by <https://www.amnesty.org/ru/documents/asa21/0931/2026/en/>



- bbc.com (2024, October 25) “Sederet kontroversi menteri-menteri dan pembantu Prabowo – Mulai dari pelanggaran HAM berat, kop surat dan anggaran Rp20 T”. Accessed by <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5yxdwv440wo>.
- bbc.com (2025, October 20) “Survei kinerja Prabowo – Apakah Gelombang Aksi Unjuk Rasa Diperhitungkan dan Sejauh Mana Bias dalam Klaim Kepuasan Publik?” Accessed by <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj0e2ml116no>.
- bbc.com (2026, May 20) “Aparat Bungkam Jurnalis dan Aktivis dengan Narasi Antek Asing”. Accessed by <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj4pqkw785lo>.
- Hardi, L. A. K. (2025, April 09) “Tipu Daya Populisme Prabowo: Memperkuat Polarisasi, Menghilangkan Oposisi”. Accessed by <https://theconversation.com/tipu-daya-populisme-prabowo-memperkuat-polarisasi-menghilangkan-oposisi-249746>.
- infobanknews.com (2026, May 21) “Membaca Ulang Pidato Lengkap Prabowo di DPR, Ini Poinnya”. Accessed by <https://infobanknews.com/membaca-ulang-pidato-lengkap-prabowo-di-dpr-ini-poinnya?page=all>.
- kompas.com (2026, February 08) Survei Indikator: Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Prabowo Capai 79,9 Persen Accessed by <https://nasional.kompas.com/read/2026/02/08/16085831/survei-indikator-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-kinerja-prabowo-capai-799>.
- kompas.id (2025, December 31) “Topik Media Sosial 2025: Tarung Narasi yang Menantang”. Accessed by <https://www.kompas.id/artikel/media-sosial-tarung-narasi-yang-menantang>.
- monas.edu (2025, February 23) “Attempt to Influence Public Opinion in the ‘Indonesia Gelap’ Protest”. Accessed by <https://www.monash.edu/indonesia/news/attempt-to-influence-public-opinion-in-the-indonesia-gelap-protest>.
- reuters (2025, February 20) “Students Lead ‘Dark Indonesia’ protests Against Budget Cuts”. Accessed by <https://www.voanews.com/a/students-lead-dark-indonesia-protests-against-budget-cuts/7981720.html>.
- reuters.com (2026, May 19) “Indonesian Authorities Using Online Disinformation Campaigns to Target Critics, Amnesty Says”. Accessed by https://www.reuters.com/business/media-telecom/indonesian-authorities-using-online-disinformation-campaign-target-critics-2026-05-19/?utm_source=chatgpt.com.
- sciencedirect.com (2017) “Post-Truth” in Chapter *Postpolitics and Post-Truth*. Accessed by <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/post-truth>.
- Seah, N. (2024, December 17) Democracy in the Digital Age: How Buzzer Culture is Stinging Indonesia’s Democracy. Accessed by <https://www.csis.org/blogs/new-perspectives-asia/democracy-digital-age-how-buzzer-culture-stinging-indonesias-democracy>.
- Temby, Q. (2024) The Prabowo Campaign’s ‘Cute Aggression’: Or How I Was Wrong About the Risk of AI in the 2024 Indonesian Elections. Accessed by <https://www.indopacifica.com/p/the-prabowo-campaigns-cute-aggression>.
- thecolumnist.id (2026, June 01) “Prabowo dan Rapor Komunikasi Politik 2025”. Accessed by <https://thecolumnist.id/artikel/prabowo-dan-rapor-komunikasi-politik-2025-3694>.
- thejakartapost.com (2025, May 24) “Prabowo’s Paradox: Building Healthy Democracy as Lasting Legacy”. Accessed by <https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/05/24/prabowos-paradox-building-healthy-democracy-as-lasting-legacy.html?utm>.



ugm.ac.id (2025, September 19) “Sering Bikin Blunder, Pemerintah Diminta Perbaiki Komunikasi Publik”. Accessed by <https://ugm.ac.id/id/berita/sering-bikin-blunder-pemerintah-diminta-perbaiki-komunikasi-publik/>